

**PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI, PENEGAKAN HUKUM DAN
ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDRONGAN KECURANGAN
AKUNTANSI (*FRAUD*)**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)

ARTIKEL

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

RINI NOVITA SARI
1303490/2013

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH BUDAYA ETIS ORGANISASI, PENEGAKAN HUKUM DAN
ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECENDRONGAN
KECURANGAN AKUNTANSI (*FRAUD*)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)**

Oleh:

Rini Novita Sari
1303490

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2018 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

**Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi terhadap
Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)**

Rini Novita Sari

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang
Email: rininovitasari28@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh budaya etis organisasi, penegakan hukum, dan asimetri informasi terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang Panjang yaitu sebanyak 24 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisis metode statistik dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sumber data merupakan pendapat dan persepsi dari setiap personil dalam instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Budaya etis organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. 2) Penegakan hukum berpengaruh signifikan negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. 3) Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.

Kata Kunci : Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi.

ABSTRACT

This research is aimed to test the empirical influence of organization's culture ethic, law enforcement and asymmetry of information on the trend of accounting fraud. The population in this study are all Regional Financial Management Working Unit (SKPKD) in Padang Panjang as many as 24 SKPD. The sample in this study using technique total sampling. The data collection technique has been done by issuing questionnaires. The data is the primary data which has been collected by issuing questionnaires to the respondents. This research is quantitative research is research that focuses on testing hypothesis with statistical method analysis tools and produce results that can be generalized. The data analysis technique has been done by using multiple linear regressions analysis. This study uses assumption test normalitas classic is test, test multicollinearity and heteroscedasticity test. The data source is the opinions and perceptions of each personnel within the government agency responsible for making or preparing financial reports. The results showed that : 1) The organization's culture ethic significant didn't effect on the tendency of accounting fraud, 2) The law enforcement significant negative effect on the tendency of accounting fraud 3) The information asymmetry positive significant effect on the tendency of accounting fraud.

Keywords : Organization's Culture Ethic, Law Enforcement and Asymmetry Information

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kecurangan berasal dari kata curang

yang artinya tidak jujur atau tidak adil. Sedangkan kecurangan adalah perbuatan yang curang, ketidakjujuran atau keculasan.

Arens (2015) menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang

disengaja dan dimaksud untuk mengambil harta atau hak orang lain. Di era persaingan yang semakin ketat saat ini, dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. (Wilopo 2006) menyatakan tindakan kecurangan dilakukan untuk memperoleh tujuan dan hasil tertentu yang dapat memberikan keuntungan pribadi maupun kelompok. Kecurangan dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi.

Tindakan kecurangan akuntansi telah berkembang diberbagai negara, termasuk di Indonesia. *Transparency International* (TI) telah merilis persepsi korupsi untuk tahun 2016. Skor Indonesia adalah 37, pada urutan 90 dari 176 negara yang diamati. Rentang indeks adalah 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Indonesia mendapati skor 37, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masing sangat tinggi (*Transparency International*, 2016). BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan pemerintah daerah. Hasil dari temuan BPK tercatat pada semester 1 tahun 2017 potensi kerugian negara adalah Rp 27,39 triliun (Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017, BPK, 2017).

Kecendrungan kecurangan akuntansi (KKA) merupakan suatu tindakan kesengajaan untuk mengalihkan atau menambahkan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan, namun kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan.

Thoyibatun (2009) menyatakan dengan terjadinya kecurangan tersebut membuat organisasi atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Sebagai contoh, volume produktivitas organisasi melemah, belanja sosial organisasi semakin sedikit, kepercayaan masyarakat yang dilayani beralih ke organisasi lain dan mitra kerja tidak ingin bekerja sama. Kasus kecendrungan kecurangan akuntansi (KKA) tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Jika demikian, reputasi dan citra organisasi yang terbangun selama ini menjadi sulit untuk dijadikan daya saing dalam meraih persaingan pasar yang semakin tajam.

Terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh budaya etis organisasi. Marwansyah (2012:184) menjelaskan budaya merupakan kombinasi yang kompleks dari asumsi-asumsi, perilaku, cerita, mitos, metafor, dan gagasan-gagasan lainnya yang terjalin satu sama lain untuk mencirikan suatu masyarakat tertentu. Budaya organisasi adalah

skumpulan pemahaman penting seperti norma-norma, nilai-nilai, sikap dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota-anggota organisasi. Budaya etis organisasi merupakan sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi.

Terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya teganya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dan juga sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain 2013). Penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat bekerja selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki tanggungjawab yang juga bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual.

Selain itu kecendrungan kecurangan akuntansi terjadi karna adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja secara keseluruhan. Menurut Mustikasari (2013) asimetri informasi terjadi antara prinsipal dan agen dengan mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Hal ini mengacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingan sehingga semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal maka kecendrungan kecurangan akuntansi semakin tinggi.

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Wilopo (2006), Najahningrum (2013) dengan menggunakan variabel penelitian yaitu asimetri informasi, serta penelitian Sulistiyono (2007) tentang budaya etis organisasi dan penelitian Pramudita (2013) tentang penegakan hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sampel yang diamati tempat dan waktu penelitian serta beberapa indikator dan item pertanyaan pada kuesioner

yang diharapkan mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan di Padang Panjang karena untuk melihat kembali dengan adanya hasil opini audit tersebut tetapi juga terjadinya kasus kecurangan. Dan untuk melihat apakah sudah baik dalam budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi atau menghindari adanya tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang)”**

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kajian Teori

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan suatu hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (yaitu pemegang saham) menunjuk orang lain sebagai agen (yaitu manager), prinsipal menggunakan jasa kepentingannya termasuk kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi antara pihak penyedia informasi dengan pihak pengguna informasi.

Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Kecendrungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecendrungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan dan fakta kritis (Soepardi, 2007)

Ikatan Akuntansi Indonesia yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui laporan keuangan

dan salah saji yang timbul dari perlakuan semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak dapat dihindari.

Menurut Sukrisno (2004) dalam Softiyan (2017), fraud atau kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu:

1. *Collusion*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.
2. *White collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasar (kalangan atas), misalnya mafia tanah.
3. *Embezzlement*, yaitu secara tidak sah harta benda untuk kepentingan pribadi.
4. *Intentional misrepresentation*, yaitu memberikan saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.
5. *Employee fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri.
6. *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, dan lain-lain.

Menurut Tuanakotta (2015:321), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan “fraud triangle” sebagai berikut:

1. Tekanan (*pressure*)
Ini sering didorong oleh kebutuhan yang (sangat) mendesak, termasuk kebutuhan untuk “sejajar” dengan tetangganya atau sekerja di perusahaan/kantor.
2. Peluang (*opportunity*)
Peluang ini berhubungan dengan budaya koporasi dan pengendalian intern yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengereksi keadaan.
3. Pemberan (*rationalization*)
Pembenaran adalah cara pelaku “menentramkan diri, misalnya “semua orang juga korupsi” atau “nanti saya kembalikan (jarahan saya)”

Di dalam laporan keuangan kecurangan dianggap sebagai suatu perlakuan yang

disengaja, baik tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang secara material menyesatkan. Berdasarkan *Assosiation of certified fraud examination* (ACFEE) dalam Mustikasari (2013) membagi *fraud* ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan
Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecurangan ini dapat bersifat finansial.
2. Penyalahgunaan aset
Penyalahgunaan aset adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Korupsi
Jenis kecurangan ini paling sulit dideteksi karena menyangkut dengan pihak lain atau kolusi. Termasuk jenis korupsi adalah penyuapan, gratifikasi (penerimaan tidak sah) contoh hadiah terkait jabatan dan wewenang.

Budaya Etis Organisasi

Budaya dapat tumbuh karena dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan pedoman bagi setiap anggota selaa mereka berada dalam lingkungan organisasi dan dapat di anggap sebagai ciri khas yang membedakan sebuah organisasi dengan yang lainnya diturunkan kepada setiap anggota baru.

Menurut Marwansyah (2012:185) budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang dianut bersama, yang dipelajari oleh kelompok pada saat menyelesaikan masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah berfungsi cukup baik sedemikian rupa sehingga bisa dipandang valid, kemudian diajarkan kepada anggota- anggota baru sebagai cara yang tepat untuk membentuk persepsi, pikiran dan perasaan yang terkait dengan masalah-masalah tersebut.

Budaya etis organisasi merupakan sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku

baik dan beretika, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan prganisasi.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberikan keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum. Penegakan hukum lebih dari sekedar menegakkans kebenaran formal, tetapi juga untuk mencari kebenaran materil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya. Tanggung jawab penegak hukum dengan demikian bertumpu kepada sikap etis, moral dan spiritual.

Faisal (2013) mengatakan bahwa kecendrungan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Asimetri Informasi

Wilopo (2006) menyatakan asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidak selarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

Anthony dan Govindrajan (2001) menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih mengetahui prospek dan informasi perusahaan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan informasi antara manajer dengan pemilik yang disebut dengan asimetri informasi.

Penelitian yang Relevan

Wilopo (2006) menuji tentang Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi (Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.

Najahningrum (2013) menguji tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*) (Persepsi Pegawai

Dinas provinsi DIY). Hasil penelitian menunjukkan, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian intern, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi dan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan akuntansi.

Zulkarnain (2013) menguji tentang, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas se-Kota Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian intern dan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Sedangkan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

Sari (2013) menguji tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung (Persepsi Pegawai Pemerintah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*, keefektifan sistem pengendalian internal dan perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap *fraud*, penegakan hukum, asimetri informasi dan kultur organisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Mustikasari (2013) menguji tentang persepsi Pegawai Dinas e-Kabupaten Batang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah.

Hubungan Antar Variabel Hubungan Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Budaya merupakan nilai-nilai yang dianut dalam suatu kelompok organisasi. Iklim yang baik akan menciptakan perilaku yang baik pula kepada setiap orang yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut. dalam organisasi pemerintahan yang kebanyakan pegawainya melakukan kecurangan dan hal tersebut di

anggap wajar, pegawai akan melakukan kecurangan tersebut dikarenakan pembenaran itu adalah suatu hal yang wajar. Demikian sebaliknya jika dalam suatu instansi ditanamkan nilai-nilai bahwa suatu kecurangan merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan banyak pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

Hubungan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kecurangan umumnya suatu tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh orang-orang dari dalam organisasi, dengan maksud untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok secara langsung merugikan pihak lain. Kecurangan disebabkan oleh adanya ketidaksadaran akan pentingnya menaati hukum/peraturan maupun kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum/peraturan. Kesadaran untuk mematuhi hukum akan timbul apabila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Dengan adanya penegakan hukum/peraturan yang baik diharapkan dapat mengurangi kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan.

Rachmatan dan Ikhan (2014) menyatakan penegakan peraturan/hukum adalah suatu proses atau upaya ditegakkannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan.

Hubungan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih dari pada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut asimetri informasi (Friska 2010). Asimetri informasi merupakan kondisi dimana terjadi ketidak seimbangan informasi yang diperoleh pihak prinsipal dan agen. Karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, dan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan (Rahmawati 2012).

Asimetri informasi memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan kecurangan, karena informasi yang disediakan oleh pihak penyedia informasi tidak selaras dengan informasi yang dibutuhkan, dan manajemen memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara melakukan penyajian laporan keuangan yang bias dan nantinya akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, hal ini akan semakin

besar peluang keterjadiannya apabila manajemen organisasi atau lembaga tidak memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Untuk meminimalisir terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen, maka pengendalian intern juga harus ditingkatkan, apabila pengendalian sudah baik maka kesempatan terjadinya asimetri informasi tersebut akan dapat diminimalisir yang akan berakibat penghentian tindakan kecurangan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau kaitan antara variabel independen

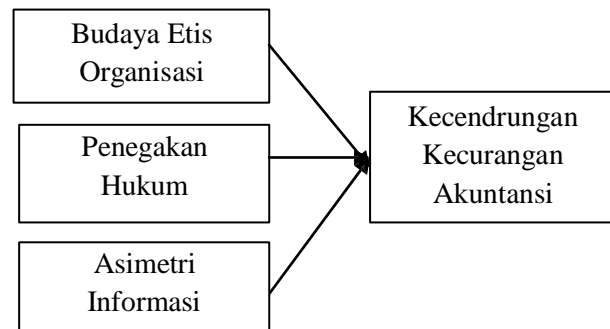
dengan variabel dependen, dalam penelitian ini memperlihatkan hubungan antara pengaruh budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi.

Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam maupun luar organisasi guna memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun kelompok. Kecurangan laporan keuangan juga merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja.

Budaya etis organisasi merupakan suatu nilai-nilai etika atau tingkah laku, kepercayaan yang menjadi panutan bagi semua anggota organisasi yang dapat di terima oleh moral dan benar secara hukum. Semakin rendah budaya etis organisasi maka akan membuat pegawai beranggapan bahwa kecurangan adalah suatu hal yang wajar. Sebaliknya apabila dalam instansi tersebut di tanamkan nilai-nilai dengan menjelaskan bahwa kecurangan suatu yang tidak baik dan dapat merugikan semua pihak, maka pegawai cenderung tidak akan melakukan kecurangan.

Penegakan hukum merupakan norma-norma hukum yang menjadi pedoman perilaku dan sebagai upaya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kecurangan terjadi karena kurangnya ketegasan dan ketidaksadaran dalam menaati hukum/peraturan.

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan dalam memperoleh informasi, antara pihak yang menyediakan informasi dan pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian terdapat peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1

Hipotesis

Dengan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi
- H2 : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi
- H3 : asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan penelitian kausatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintahan Kota Padang Panjang yang berjumlah 24 SKPD. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih sebagai sumber daya dengan menggunakan total sampling. Responden sebanyak 3 orang, yang terdiri dari kepala SKPD, kepala bagian akuntansi dan 1 staf bagian akuntansi pada masing-masing SKPD.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjektif. Data subjektif adalah data penelitian berupa opini, sikap dan pengalaman atau karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek penelitian atau responden.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei lapangan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di SKPD Kota Padang Panjang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada Kepala SKPD, kepala bagian akuntansi dan 1 orang staf bagian akuntansi di SKPD Kota Padang Panjang. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis yang terstruktur kepada responden untuk menjawab. Kuisisioner disebar-kan secara langsung pada responden, responden diharapkan mengembalikan kuisisioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan dan dijemput langsung ke kantor SKPD yang ada di Kota Padang Panjang sesuai dengan kesepakatan pengembalian.

Variabel Penelitian

X1 : Budaya Etis Organisasi
X2 : Penegakan Hukum
X3 : Asimetri Informasi
Y : Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2007:45). Sebelum kuisisioner dibagikan maka dilakukan uji pendahuluan. Untuk uji validitas maka digunakan rumus product moment.

Jika maka nomor item tersebut tidak valid dan jika maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap koksisiten,

jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus cronboach's alpha. Jika cronboach's alpha lebih besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel.

Uji Asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter tidak bias, yaitu:

Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui model statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode kolmogrov sminov, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan >0,05 maka akan berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidasmamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedasitas dapat menggunakan uji gletser. Data yang tidak heteroskedasitas adalah data yang nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05.

Uji Multikolinearitas

Multikolonearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolonearitas dilakukan dengan menilai VIF (Variance Inflating Factor) < 10 dan tolerance > 0,10.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Metode Analisis Data

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, dan diolah oleh SPSS. Model regresi yang dilakukan sebagai berikut:

Dimana:

Y = Kecurangan keuangan Akuntansi

A = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi dari variabel independen

X₁ = Budaya Etis Organisasi

X₂ = Penegakan Hukum

X₃ = Asimetri Informasi

E = Epsilon (variabel-variabel independen lain tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain)

Analisis Deskriptif

Verifikasi data yaitu memberikan kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden. Menghitung nilai jawaban Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item yang diajukan

Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

Dimana :

SL = Selalu

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Menghitung nilai rata-rata jawaban responden dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum \text{---}}{N}$$

Dimana :

X_i = Skor total

N = jumlah responden

I = Data ke 1,2,3.....n

∑ = Jumlah

Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

—

Dimana :

TCR = Tingkat Capaian Responden

R_s = Rata-rata Skor Jawaban Responden

N = Nilai Skor Jawaban

Nilai persentase dimasukkan kedalam kriteria sebagai berikut:

a. Interval jawaban responden 76 – 100% kategori jawabannya baik

b. Interval jawaban responden 56 – 75% kategori jawabannya cukup baik.

c. Interval jawaban responden < 56% kategori jawabannya kurang baik.

Uji Model

Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang

digunakan telah fix atau tidak

Jika atau sig < 0,05, maka H_a diterima, dan H₀ ditolak. Jika , atau sig > 0,05, maka H_a ditolak dan H₀ diterima. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk menguji hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05

Uji t (t test)

Uji t statistik dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Dalam penelitian ini digunakan tingkat resiko 5% (α=5%). Jika nilai signifikan t dihitung kecuali α = 5% yang dapat dilihat dari hasil analisis berganda , maka keputusan dari semua hasil tersebut adalah hipotesis diterima. Jika nilai signifikan t terhitung lebih besar α=5% maka keputusan dari hasil tersebut adalah hipotesis ditolak.

Definisi operasional

Kecurangan Akuntansi

Kecurangan dalam laporan keuangan adalah suatu hal yang sengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.

Budaya Etis Organisasi

Budaya etis organisasi merupakan suatu sistem nilai, norma dan kepercayaan yang bersama-sama dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang nantinya akan

mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi agar terciptanya perilaku baik dan beretika serta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi. Budaya organisasi yang buruk akan mengakibatkan karyawan akan gampang melakukan kecurangan. Sebaliknya jika budaya organisasi yang baik maka akan semakin rendah untuk melakukan kecurangan tersebut.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku. Penegakan hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dan sebagai aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota organisasi selama proses operasional sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan situasi ketika terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki informasi atau pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Dengan keadaan tersebut memberikan peluang bagi pihak agent untuk menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, kecendrungan terjadinya kecurangan akan semakin tinggi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 24 SKPD di Kota Padang Panjang. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*). Setiap sampel terdiri dari 3 orang responden yaitu, Kepala atau Wakil SKPD, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan 1 staf bagian akuntansi pada masing-masing SKPD di Kota Padang Panjang, sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 72 kuesioner. Pada batas terakhir pengumpulan data kuesioner yang diterima kembali sebanyak 72 kuesioner dimana dalam penelitian ini kuesioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu (16 Mei 2018 s.d 16 Agustus 2018). Tingkat respon dari responden adalah 100%.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Untuk variabel Y diketahui besarnya nilai mean adalah 16,81 dengan standar deviasi 6,456; nilai maximum sebesar 31; dan nilai minimum sebesar 9. Untuk variabel X1 diketahui nilai mean 19,71 dengan standar deviasi 2,279; nilai maximum sebesar 25; dan nilai minimum sebesar 14. Untuk X2 diketahui nilai mean 19,54 dengan standar deviasi 4,383; nilai maximum 25; dan nilai minimum 5. Dan un X3 dengan nilai mean 22,78 dengan standar deviasi 4,210; nilai maximum 30; dan nilai minimum 6.

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji Validas

Uji validasi nilai terkecil dari *Corrected Ite-Total Colleration* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Budaya Etis Organisasi (X1) memiliki nilai *Corrected Ite-Total Colleration* terkecil 0,689, untuk instrumen Penegakan Hukum (X2) nilai instrumen terkecil 0,523 dan untuk instrumen Asimetri Informasi (X3) nilai terkecil 0,749. Sedangkan untuk instrumen Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Y) diketahui nilai *Corrected Ite-Total Colleration* terkecil 0,563.

Uji Reliabilitas

Nilai keandalan *Cronbach's Alpha* pada uji reliabilitas yaitu pada instrumen Budaya Etis Organisasi adalah 0,843, untuk instrumen Penegakan Hukum adalah 0,694 dan instrumen Asimetri Informasi 0,905. Sedangkan untuk instrumen Kecendrungan Kecurangan Akuntansi adalah 0,879. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,6 ini mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat kolmogrov smornov. Kolmogrov-Smirnov untuk keempat variabel dalam penelitian ini $> 0,05$ ($0,755 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat melalui Variance Inflation

Factor (VIF) < 10 dan tolerance >0,1. Variabel Budaya Etis Organisasi (X1) dengan nilai VIF 1,085, Penegakan Hukum (X2) dengan nilai VIF 1,108 dan Asimetri Informasi nilai VIF 1,023. Untuk nilai tolerance Budaya Etis Organisasi nilai tolerance 0,922, Penegakan Hukum nilai

tolerance 0,902 dan Asimetri Informasi nilai tolerance 0,978. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji Heterikedastisitas perhitungan dari masing-masing menunjukkan level sig > 0,05, yaitu 0,201 untuk variabel Budaya Etis Organisasi, 0,297 untuk variabel Penegakan Hukum dan 0,676 untuk variabel Asimetri Informasi, ini berarti bahwa penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Uji Model

Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak.

Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan derajat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa signifikansi adalah 0,013 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

Adjusted R Square

Nilai Adjusted R² yang diperoleh sebesar 0,107 atau sebesar 10,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,7%. Dan sisanya sebesar 89,3% di tentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Regresi berganda

Berdasarkan pada tabel dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 7,942 + 0,329 X1 - 0,356 X2 + 0,410 X3 + e$$

Keterangan :

Y = Kecendrungan Kecurangan Akuntansi
a = Konstanta

X1 = Budaya Etis Organisasi
X2 = Penegakan Hukum
X3 = Asimetri Organisasi
e = Standar error

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 7,942 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi adalah nol maka nilai kecendrungan kecurangan akuntansi adalah sebesar konstanta 7,942.
- Nilai koefisien budaya etis organisasi 0,329 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan budaya etis organisasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kecendrungan kecurangan akuntansi sebesar 0,329 satuan.
- Nilai koefisien penegakan hukum -0,356 mengindikasikan bahwa setiap penurunan tentang adanya penegakan terhadap hukum dalam satu satuan akan menyebabkan peningkatan kecendrungan kecurangan akuntansi sebesar -0,356 satuan.
- Nilai koefisien asimetri informasi 0,410 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan asimetri/kesenjangan terhadap informasi dalam satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kecendrungan kecurangan akuntansi sebesar 0,410 satuan.

Uji t

Pengujian hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Budaya Etis Organisasi berpengaruh positif terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi. Diketahui bahwa budaya etis organisasi memiliki nilai β 0,329 (Sig. 0,324 > 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Budaya Etis Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi, dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

Pengujian hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa dengan β -0,356 (Sig. 0,045 < 0,05). Hal ini menunjukkan Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Pengujian hipotesis 3

Hipotesis ketiga adalah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Berdasarkan pada tabel 20 diatas diketahui bahwa dengan β 0,410 (Sig. 0,021 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, dengan demikian hipotesis ketiga diterima

Pembahasan

Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa budaya etis memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Faisal (2013) juga menyimpulkan hasil yang sama. Menurut Faisal (2013) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal berasal dari faktor individu. Perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor eksternal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan organisasi saja tetapi juga faktor lingkungan di luar organisasi.

Disamping faktor internal di luar lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku individu, faktor internal juga sangat berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut. Salah satu contoh faktor internal tersebut adalah faktor moral individu itu sendiri. Walaupun budaya organisasi pada instansi sudah etis, namun apabila moral dari pegawai instansi kurang etis, bukan tidak mungkin dapat terjadi kecurangan (*fraud*) dalam instansi tersebut.

Pada penelitian di Pemda Kota Padang Panjang, hasil penyebaran kuisioner pada setiap SKPD menunjukkan, tingkat capaian responden terendah yaitu pada item pernyataan nomor 5 yaitu dengan pernyataan adanya supervisi yang menangani masalah perlindungan etika dengan nilai 75,28%, dengan kategori baik, artinya didalam lingkungan SKPD perlu adanya supervisi yang menangani masalah perlindungan etika bagi karyawan di instansi. Dengan adanya etika yang baik dan di awasi akan berpengaruh baik terhadap kinerja dan hasil kinerja karyawan di instansi. Sementara tingkat capaian rata-rata dari

budaya etis organisasi adalah sebesar 78,83%. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa budaya etis organisasi di Pemerintahan Kota Padang Panjang dikategorikan baik.

Budaya etis organisasi merupakan bagian pada *Fraud Triangell Teori*, dimana budaya etis organisasi termasuk dalam tingkat rasionalisasi. Rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Pada umumnya para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan, tapi merupakan suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi misalnya masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang contohnya posisi, gaji, promosi. Dalam kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut.

Karena budaya etis organisasi merupakan nilai, norma dan kepercayaan dari anggota organisasi atau masing-masing individu yang akan mempengaruhi cara bekerja pola berperilaku baik dan beretika dan untuk menghindari terjadinya kerugian di organisasi. Yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam budaya etis organisasi suatu instansi tergantung pada diri sendiri, dari atasan dan juga lingkungan organisasi. budaya merupakan suatu keputusan yang di anut bersama di dalam suatu organisasi, jadi apabila ada seseorang yang melanggar peraturan di instansi tersebut, bisa diberikan hukuman berupa pemecatan atau pemotongan gaji. Dan ini bisa dijadikan contoh nyata untuk pegawai lain yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan bersama.

Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin rendah penegakan hukum pada instansi/organisasi maka akan semakin tinggi peluang terjadinya kecurangan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikasari (2013) yang menjelaskan terdapat pengaruh negatif penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Putro (2009) pada dasarnya praktik kecurangan akan terus terjadi dalam

suatu entitas apabila pegawai tersebut tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan dibuat agar kegiatan operasional entitas berjalan lebih efektif dan efisien. Jika dalam suatu entitas, pejabat yang berwenang tidak bertindak secara tegas, seperti memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan, maka pegawai akan melakukan pelanggaran tersebut terus menerus sehingga nantinya akan berdampak kerugian. Menurut Najahningrum (2013), tidak ada organisasi yang terbebas dari fraud (kecurangan) karena pada dasarnya permasalahan ini bersumber dan bermula pada masalah manusia.

Pada penelitian di Pemda Kota Padang Panjang, hasil penyebaran kuisioner pada setiap SKPD menunjukkan tingkat capaian responden terendah yaitu pada pernyataan nomor 2 yaitu dengan pernyataan di instansi merasa para pejabat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan dengan nilai 73,33%, dengan kategori baik, sebagian besar pejabat instansi di Padang Panjang tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan dengan demikian setiap pelanggaran yang terjadi instansi pejabat akan berlaku tegas untuk memperoleh kinerja yang baik, jujur dan taat aturan. Dengan adanya penegakan hukum atau aturan yang berlaku akan membuat karyawan takut melakukan pelanggaran. Sementara tingkat capaian rata-rata dari penegakan hukum adalah sebesar 78,17%. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Pemda Kota Padang Panjang dikategorikan baik.

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku di suatu Negara. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari hukum yang berlaku. Kecurangan dapat disebabkan oleh adanya ketidaksadaran akan pentingnya menaati hukum/peraturan. Perilaku pejabat yang tidak tegas terhadap peraturan yang berlaku maka akan mengakibatkan pegawai akan senantiasa untuk melakukan tindakan pelanggaran peraturan tersebut, salah satunya kecurangan. Jadi, bila di instansi lemah terhadap penegakan hukum yang berlaku, akan membuka peluang bagi karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti semakin tinggi asimetri informasi maka

akan semakin tinggi pula peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Sesuai dengan penelitian Mustikasari (2013) yang menjelaskan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Yang berarti semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam instansi tersebut. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Wilopo (2006) yang memperoleh hasil bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecendrungan kecurangan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rahmawati dan Soetikno (2012) yang menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Hal ini dikarenakan ketidakselarasan informasi yang diterima oleh pihak intern instansi dan pihak ekstern instansi tidak dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Pada penelitian di Pemda Padang Panjang, hasil penyebaran kuisioner pada setiap SKPD menunjukkan tingkat capaian responden terendah yaitu pada item pernyataan nomor 6 yaitu dengan pernyataan hanya pihak internal instansi yang mengetahui ini dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun dengan nilai 74,17%, dengan kategori baik. Artinya pada kegiatan instansi membuat laporan keuangan hanya pihak yang dalam saja yang mengetahui berapa besaran angka sebenarnya laporan keuangan tersebut. Sementara tingkat capaian rata-rata dari asimetri informasi di Pemda Kota Padang Panjang adalah sebesar 75,93% dengan hasil distribusi frekuensi atas pernyataan kepada setiap SKPD di Padang Panjang dikategorikan baik.

Dengan terjadinya asimetri informasi, akan memicu terjadinya kecurangan dari para staf. Dalam hal ini pimpinan akan menjadi penentu apakah kecendrungan kecurangan dapat diminimalisir atau tidak. Pada setiap informasi yang berkaitan dengan instansi seharusnya disampaikan kepada semua staf, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemberian informasi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada para staf. Apabila rasa tanggung jawab tersebut telah di tanamkan, maka kecurangan akan dapat dihindari.

Pengelola laporan keuangan tentu saja mengetahui laporan keuangan yang sebenarnya dikarenakan pengelola keuangan terlibat langsung dengan kegiatan organisasi, sementara pihak eksternal organisasi memiliki informasi

yang lebih sedikit dibandingkan pengelola. Dikarenakan kondisi demikian maka banyak peluang pengelola keuangan untuk mengambil kesempatan memanipulasi laporan keuangan. Tetapi apabila dalam organisasi/instansi tersebut bersikap sewajarnya dalam artian transparansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional organisasi yang berpengaruh terhadap laporan keuangan hal tersebut tidak akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, Budaya Etis Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Penegakan Hukum berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Dan asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah Kota Padang Panjang.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti, lamanya menunggu surat balasan untuk melakukan izin penelitian di Pemda Padang Panjang, kurangnya waktu penelitian, lokasi SKPD yang berbeda-beda dan kesibukan setiap dinas mengakibatkan pembagian dan pengumpulan kuisioner tidak sesuai target, dan susah mencari teori pendukung untuk memperkuat pembahasan.

Saran

Terdapat beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya, Dari hasil penelitian ini terlihat dari hasil variabel yang diteliti sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada munculnya kecurangan akuntansi di pemerintah. Bagi instansi diharapkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas untuk setiap pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya

kecurangan dan merugikan organisasi dan penelitian ini masih terbatas pada budaya etis organisasi, penegakan hukum dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja. 1992. Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing), Rineka cipta: Jakarta Transparency International, 2016. Peringkat Korupsi Negara di Dunia.
- Anthony, N Robert dan Govindarajan, Vijay. 2005. Management Control System buku 2. Salemba empat: Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Arens, Alvin A. 2015. Auditing & Jasa Assurance. Edisi Kelimabelas. Jilid 1 Jakarta: Erlangga
- Chandra, Devia Prapnalina. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan. Skripsi. Unoversitas Negeri Semarang.
- Faisal, Muhammad. 2013. Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. Accounting Analysis Journal. Vol. 5 No. 2.
- Friskila. Monigka. 2010. Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Manajemen dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). FE UNP: Padang
- IAI. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per Januari 2001. Jakarta: Salemba empat
- Jansen, Michael C & Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership

- Structure. Journal Of Financial Economics
- Kumalasari, Nova Riska. 2011. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening". Skripsi: Semarang: UNDIP
- Luthans. Fred. 2006. Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh. Yogyakarta :Penerbit Andi
- Mustikasari. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Universitas Negeri Semarang: Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Analysis Journal. Vol. 2 (3).
- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. Accounting Analysis Journal, Vol. 1 (2).
- Pristiyanti, Ika Rully. 2012. "Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan." Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.
- Puspasari, Novita & Suwardi, Eko. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 15.
- Puspitadewi dkk. 2012. "Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal." The Indonesian Accounting Review Volume 2 no. 2 pages 159-172.
- Rahmawati, Ardiana Peri. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramdhana, Senna Afriaska. (2015). Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*). Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sawyer, Lawrence.B. 2006. Internal Auditing. Salemba Empat: Jakarta. Softian, Pria Agung. 2017 "Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Motivasi dan Budaya Etis organisasi terhadap Kecenderungan Laporan Keuangan Daerah." Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi UNP.
- Sulistiyowati. 2007. Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sudarma, Putu Mudyasani & Putra, I Wayan. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance pada Biaya Keagenan. Universitas Udayana. ISSN 2302-8556
- Sutrisno, Edy. 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana
- Thoyibatun, Siti. (2009). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Tika, Moh Pabubi. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Bumi Aksara: Jakarta
- Transparency International, 2017. Peringkat Korupsi Negara di Dunia. Undang – undang Dasar 1945

www.bpk.go.id

Wilopo.(2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Pubik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. Padang

Zulkarnain, Rifqi Mirza.2013.”Analisis

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta”. Accounting Analysys Journal AAJ1(3)(2013)

<https://katadata.co.id/berita/2017/10/03/bpk-temukan-permasalahan-senilai-rp-2739-triliun-di-semester-i2017>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/95160-terdakwa-korupsi-koni-padang-panjang-divonis.html>

Lampiran

1. Uji Validitas dan Reabilitas

Budaya Etis Organisasi (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.843	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X11	14.1333	11.154	.717	.795
X12	14.2667	10.478	.709	.794
X13	14.6667	11.540	.499	.853
X14	14.1000	10.645	.714	.793
X15	14.4333	11.082	.626	.817

Penegakan Hukum (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.694	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X21	14.1667	5.454	.593	.595
X22	14.8000	6.166	.250	.726
X23	14.6000	5.559	.453	.644
X24	14.7667	5.357	.399	.671
X25	14.4667	4.878	.607	.572

Asimetri Informasi (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.905	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X31	13.1333	17.016	.698	.894
X32	13.2000	17.545	.647	.901

X33	13.1333	16.120	.727	.890
X34	13.1667	16.282	.732	.889
X35	13.0333	15.206	.846	.871
X36	13.1667	16.420	.785	.882

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y11	29.3333	24.506	.529	.877
Y12	28.9667	25.275	.552	.872
Y13	29.2000	23.890	.781	.852
Y14	29.1000	24.852	.697	.860
Y15	28.9333	23.789	.744	.855
Y16	28.9000	24.438	.709	.858
Y17	29.0000	25.931	.529	.874
Y18	28.9667	27.275	.467	.878
Y19	28.9333	25.237	.634	.865

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.97020883
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.674
Asymp. Sig. (2-tailed)		.755

a. Test distribution is Normal.

3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.942	7.842		1.013	.315		
Budaya Etis Organisasi (X1)	.329	.331	.116	.993	.324	.922	1.085
Penegakan Hukum (X2)	-.356	.174	-.242	-2.047	.045	.902	1.108

Asimetri Informasi (X3)	.410	.174	.267	2.358	.021	.978	1.023
-------------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Y)

4. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.237	4.378		.283	.778
	Budaya Etis Organisasi (X1)	.239	.185	.160	1.293	.201
	Penegakan Hukum (X2)	-.102	.097	-.132	-1.051	.297
	Asimetri Informasi (X3)	.041	.097	.051	.420	.676

a. Dependent Variable: RES2

5. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.597	3	142.866	3.839	.013 ^a
	Residual	2530.681	68	37.216		
	Total	2959.278	71			

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi (X3), Budaya Etis Organisasi (X1), Penegakan Hukum (X2)

b. Dependent Variable: Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Y)

6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.381 ^a	.145	.107	6.10048

a. Predictors: (Constant), Asimetri Informasi (X3), Budaya Etis Organisasi (X1), Penegakan Hukum (X2)

7. Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.942	7.842		1.013	.315
	Budaya Etis Organisasi (X1)	.329	.331	.116	.993	.324
	Penegakan Hukum (X2)	-.356	.174	-.242	-2.047	.045
	Asimetri Informasi (X3)	.410	.174	.267	2.358	.021

a. Dependent Variable: Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Y)